

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 86 – 101

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN KAMPUNG TERHADAP PERSEPSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBKamp) (Studi di Kampung Bukit Makmur, Kabupaten Berau)

HANDAYANI JAKA SAPUTRA

Handayani8633@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Berau

SURYADI

Putraborneo690@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Berau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kampung Bukit Makmur, Kabupaten Berau dalam pengelolaan keuangan kampung pada APBKamp. Bagaimana persepsi mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat kampung dalam penyusunan APBKam dan akuntabilitas penggunaannya. Objek penelitian ini adalah masyarakat Kampung Bukit Makmur yang terlibat dan hadir dalam pembahasan pengelolaan APBKam. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara dengan responden. Sedangkan data sekunder penelitian ini berasal dari data laporan dana kampung. Teknik pengambilan sampel yang dipilih adalah Stratified Random Sampling, dengan jumlah sampel 50 orang. Teknik penelitian ini menggunakan analisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan kampung berpengaruh simultan terhadap persepsi anggaran pendapatan dan belanja kampung. Kedua, partisipasi masyarakat secara parsial tidak mempengaruhi persepsi anggaran pendapatan dan belanja kampung. Ketiga, akuntabilitas keuangan kampung berpengaruh parsial terhadap persepsi anggaran pendapatan dan belanja kampung.

Kata kunci: Persepsi, Partisipasi, Akuntabilitas, dan Berau.

ABSTRACT

This study aims to determine the perceptions of rural communities in village Bukit Makmur, Berau District financial management in the form of APBKam. How perceptions affect the level of participation of village communities in the preparation of APBKamp and accountability for their use. The object of this research is the

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 86 – 101

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Villagers Bukit Makmur, Berau District who are involved and attend the discussion of APBKam management. Primary data in this study is data collected through questionnaires and interviews with respondents. Meanwhile, the secondary data of this research comes from village fund report data. The sampling technique chosen was Stratified Random Sampling, with a total sample of 50 people. This research technique uses multiple linear regression data analysis. The results showed that; first, community participation and village financial accountability had a simultaneous effect on the perception of the village income and expenditure budget. Second, community participation does not have a partial that effect on perceptions of village income and expenditure budgets. Third, village financial accountability has a partial effected on perceptions of village income and expenditure budget.

Keywords: *Perceptions, Participation, Accountability, and Berau*

I. PENDAHULUAN

Pemerintah desa/kampung merupakan badan yang menjalankan fungsi dan urusan pemerintahan. Menurut asas otonomi dan tugas pembantu, pemerintah desa memiliki prinsip dalam pelaksanaan sistem desentralisasi. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 menjamin sistem desentralisasi bagi pemerintahan. Pemberian wewenang otonomi pada pemerintahan daerah diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan sumber daya dengan asas keadilan dan kepatuhan dibawah payung hukum. Menurut Mamuaja (2016) adanya undang-undang tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah desa dalam melaksanakan wewenang otonomi, secara independen berhak untuk mengelola Dan mengatur urusan pembangunan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Pemerintah mengalokasikan dana desa untuk meningkatkan pembangunan di Desa/kampung. Alokasi dana untuk desa/ kampung ini, diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa/ kampung. Sumber Dana ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Indonesia, 2017). Tujuan lain dari dana desa/ kampung ini, pemerintah mengharapkan adanya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat desa, serta desa dapat menjadi subjek pembangunan.

Dana desa/kampung diberikan sejak tahun 2015. Jumlah alokasi dana desa mengalami kenaikan setiap tahun dan saat ini nilainya mencapai Rp 1 milyar untuk setiap desa/ kampung. Dana desa wajib dikelola secara mandiri oleh Kepala kampung dan Aparat kampung. Tahapan perencanaan, pelaksanaan,

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 86 – 101

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawabannya dana desa seluruhnya disajikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/kampung (APBdes/kamp). Melalui APBKamp diharapkan tujuan alokasi dana kampung akan dicapai secara optimal, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan dana kampung yang akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban dari tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan ini juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penelitian Wibowo (2016) terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan gender dari kepala desa. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengukur ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana desa.

Pernyataan tentang akuntabilitas dana desa oleh lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan korupsi anggaran dana desa disebabkan oleh pengelolaan anggaran yang tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa (ICW, 2018). Penelitian Saputra (2019) dilakukan menemukan pertanggungjawaban dana desa belum optimal dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Hal itu disebabkan

kurangnya pemahaman pembuatan laporan pertanggungjawaban, kebingungan karena perubahan peraturan dan keterlambatan pencairan dana desa.

Prabu (2020) menemukan penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana desa juga diperlukan agar tujuan alokasi dana desa dapat tercapai dengan optimal. Hasil penelitian lainnya menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa mampu menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat rendah mengakibatkan pengelolaan keuangan desa menjadi tidak transparan dan tidak akuntabel (Iskandar, 2014).

Penggunaan dana desa juga yang belum efektif mencapai tujuan karena masyarakat belum secara aktif terlibat dalam pengelolaan dana desa (Azis, 2016) Kondisi ini mengakibatkan dana desa yang dialokasikan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran.

Penelitian dana desa di desa Masalembu Sumenep, menemukan pengelolaan keuangan desa yang belum transparan dan partisipatif karena pendampingan pemerintah kabupaten belum optimal (Sulaiman, 2019). Sedangkan penelitian di Saemba kec Mori Kabupaten Morowali, dana desa telah dilakukan perencanaan yang

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 86 – 101

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

melibatkan masyarakat sehingga dana desa dapat dimanfaatkan dalam bentuk pembangunan, namun dalam pertanggungjawaban dana desa ini belum tepat waktu dan masih memerlukan bimbingan dari pemerintah (Tandi, 2018).

Penelitian lainnya terkait pelatihan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dikembangkan oleh Pemerintah hasil yang belum maksimal karena kemampuan sumber daya manusia yang terbatas (Lusdani dan Ta'dung, 2020).

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat diketahui adanya beberapa permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan dana di desa. Selain masalah klasik korupsi, ketidaksiapan personal dan pemahaman atas peraturan masih menjadi kendala. Faktor partisipasi juga berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana di desa. Meskipun pemerintah telah mengatur mekanisme pengelolaan keuangan yang melibatkan kehadiran masyarakat dalam setiap proses perumusannya. Pemerintah juga telah berusaha melakukan pendampingan untuk menumbuhkan partisipasi. Pelatihan keuangan desa juga dilakukan untuk menghasilkan pertanggungjawaban yang standar dan terukur.

Partisipasi dan akuntabilitas ini akan mempunyai kaitan dalam membentuk persepsi masyarakat. Penelitian tentang persepsi masyarakat desa oleh Hanun (2020) menyatakan

belum adanya kesiapan pemerintahan desa dalam membuat laporan keuangan desa berdasarkan peraturan tentang Desa. Di desa Bajur, persepsi masyarakat terhadap peraturan pengelolaan keuangan desa sudah baik walaupun terdapat masalah berupa pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana awal yang disepakati bersama (Ibrahim, 2017).

Pada beberapa penelitian tersebut, diketahui bahwa persepsi tersebut terbentuk dari keterlibatan masyarakat, keputusan yang sudah memperhatikan pendapat dan kebutuhan warga, pengelolaan keuangan yang transparan, informatif dan terbuka, dan hasil yang dapat dirasakan manfaatnya.

Pengelolaan dana desa memang sangat menarik untuk dilakukan penelitian, mengingat alokasi dana desa ini merupakan program baru pemerintah sejak tahun 2015. Permasalahan yang dihadapi dana desa ini perlu mendapatkan solusi secara tepat. Berdasarkan referensi tersebut, penelitian yang akan dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa berupa APBDes.

Persepsi tersebut antara lain dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan APBDes dan akuntabilitas penggunaannya. Penelitian Escobar dan Ross (2014) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan persepsi dan

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 86 – 101

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

akuntabilitas. Dana desa yang ditransfer pemerintah pusat ke desa merupakan salah satu bentuk desentralisasi fiskal.

Penelitian lain yang menguji persepsi para manajer oleh Wang dan Wan (2007) menunjukkan bahwa partisipasi yang melibatkan dalam pengelolaan administratif secara signifikan dapat menjelaskan kepercayaan publik atau masyarakat.

II. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* mengarahkan bahwa manajer tidak terpengaruh oleh keinginan yang bersifat individualistik. Teori ini berfokus dan mengacu pada hasil yang diperoleh untuk kepentingan dan tujuan organisasi (Davis & Donaldson, 1997). Penelitian ini menjadikan teori *stewardship* sebagai teori rujukan utama (*grand theory*) karena dalam pemerintahan desa berhubungan langsung dengan masyarakat.

Pemerintah Desa memiliki tujuan bersama yang harus dipahami oleh setiap aparatur pemerintahan desa dan dalam praktiknya berfokus pada tujuan organisasi bukan individual. Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa dianggap sebagai pelayan publik (*steward*) yang termotivasi oleh kepentingan bersama dan tujuan pengelolaan dana desa yaitu meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan individu yang bersifat mental dan emosional dalam situasi kelompok bagi pencapaian tujuan bersama dan berbagi tanggungjawab bersama. Partisipasi yang diberikan oleh individu bukan hanya aktivitas fisik tetapi juga sisi psikologi yaitu seberapa besar pengaruh yang dianggap memiliki seseorang dalam pengambilan keputusan (Saputra, 2019).

Sementara Lubis (2010) menyatakan bahwa partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Ketika diterapkan kepada perencanaan, partisipasi mengacu pada keterlibatan manajer tingkat menengah dan bawah dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada penentuan tujuan operasional dan penetapan sasaran kinerja.

Dalam kaitannya dengan dana desa, partisipasi masyarakat diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan terlibat melakukan pengawasan atas pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan.

3. Akuntabilitas

Desa sebagai bagian suatu negara wajib melaksanakan kegiatan pemerintahan. Salah satunya yang dilakukan oleh aparat desa yaitu melakukan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa ini wajib

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 86 – 101

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

memperhatikan *good governance* sebagai salah satu ukuran dalam penilaian kinerja suatu desa. Prinsip *good governance* ini meliputi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini juga disampaikan Mardiasmo (dalam Suwanda et al, 2019), yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan efisien akan menambah akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat dan menciptakan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas juga menunjukkan proses kerja sama antara masyarakat dan *stakeholders* untuk memperbaiki kinerja pemerintah.

Pendapat O'Donnel dalam Lusdani dan Ta'dung (2020), menjelaskan akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban antara atasan dan bawahan sehingga digunakan sebagai alat untuk melakukan pengawasan. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) merupakan pertanggungjawaban antara pihak yang mempunyai kedudukan yang sejajar sehingga dapat digunakan sebagai fungsi pengecekan dan melengkapi.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa akuntabilitas vertikal dapat diwujudkan berupa pertanggungjawaban antara aparat desa dengan pemerintah kecamatan atau kabupaten, sedangkan akuntabilitas horisontal merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa

kepada Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa.

Dengan demikian dalam pengelolaan APBDes sebagai proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan di pertanggungjawabkan kepada masyarakat, perlu dilakukan kajian akuntabilitas, dalam rangka tersedianya informasi yang handal dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa.

4. Persepsi

Program pemerintah dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan motivasi dan dukungan dari semua pihak. Motivasi untuk mewujudkan program ini dapat muncul dari tindakan individu dan dipengaruhi oleh persepsi masyarakat.

Persepsi merupakan proses seseorang untuk memilih, mengolah dan menafsirkan informasi yang diterima sehingga dapat menciptakan pengertian atau makna dari suatu obyek (Kotler, 2001). Pendapat lain disampaikan Robbins dan Judge (Wibowo, 2015), menyatakan persepsi adalah proses individu untuk mengorganisir dan menginterpretasikan tanggapan atas kesan mereka dan memberikan makna pada lingkungan, tetapi apa yang dirasakan dapat berbeda secara substansial dari pada realitas obyektif.

Dengan demikian persepsi merupakan proses yang sangat individu sehingga hasilnya sangat sulit

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 86 – 101

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

ditentukan terlebih lagi ada kemungkinan bias dan distorsi dapat diperbaiki dengan meningkatkan kepedulian, saling mengingatkan dan meningkatkan interaksi antar individu agar muncul kepercayaan dan empati antar individu.

Persepsi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa juga diharapkan mampu mewujudkan tujuan alokasi dana desa yaitu meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan perekonomian desa. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian lebih rinci mengenai persepsi masyarakat terkait pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa, sehingga pemanfaatan dana desa dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

III. KAJIAN EMPIRIS

1. Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Kampung

Persepsi merupakan proses seseorang untuk memilih, mengolah dan menafsirkan informasi yang diterima sehingga dapat menciptakan pengertian atau makna dari suatu obyek. Motivasi memanfaatkan dana desa untuk masyarakat dapat muncul dari tindakan partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap dana desa.

Penelitian persepsi masyarakat terhadap dana desa dilakukan di Desa Kertajaya, yang telah memanfaatkan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan persepsi masyarakat menunjukkan kecenderungan baik. (Isti,

2017) Penelitian lain mengenai persepsi masyarakat terkait dana desa belum memuaskan karena pertama, penggunaan anggaran pembangunan tidak optimal walaupun telah dimusyawarahkan, kedua dana desa dikelola oleh pihak yang tidak kompeten, ketiga, dana desa telah digunakan tepat waktu (Solichin dan Samsul, 2018). Persepsi masyarakat terhadap Pemanfaatan Dana Desa di Desa Kanonang 2 Kecamatan Kawangkoan Barat adalah baik berupa dampak pada Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Komaling et al, 2020)

Persepsi *stakeholder* ditemukan pemerintah desa masih belum siap dalam implementasi pelaporan keuangan desa karena latar belakang pendidikan, kurang pemahaman teknologi, budaya sikap praktis dalam pelaporan, serta kurangnya intensitas pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Hanun, 2020). Berdasarkan deskripsi diatas dapat dirumuskan hipotesis:

H1: Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan kampung Berpengaruh Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung.

2. Partisipasi Masyarakat

Dalam menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan kampung yang optimal adanya partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi program yang direncanakan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 86 – 101

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

dan peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Hasil penelitian terkait partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa menemukan bahwa partisipasi masyarakat mampu menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan apabila masyarakat tidak dilibatkan maka pengelolaan keuangan desa menjadi kurang transparan dan akuntabel (Syamsi, 2014).

Penelitian lainnya menemukan penggunaan dana desa belum efektif disebabkan masyarakat tidak secara aktif terlibat dalam pengelolaan dana desa (Aziis, 2016). Penelitian dana desa di desa Masalembu Sumenep, menemukan pengelolaan keuangan desa tidak transparan dan partisipatif karena pendampingan pemerintah kabupaten belum optimal (Hanafie et al, 2019)

Sedangkan penelitian di Saemba kec Mori Kabupaten Morowali, perencanaan dana desa telah melibatkan masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, namun kendala pertanggungjawaban dan masih memerlukan bimbingan dari pemerintah (Tandi, 2018).

Kajian ICW, menemukan bahwa minimnya keikutsertaan masyarakat untuk pengawasan dana desa akan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan menjadi salah satu bentuk tindakan korupsi.

Pengelola dana desa, juga mengalami kendala akibat kurangnya pemahaman aparat desa mengenai

standar akuntansi pemerintah, adanya perubahan regulasi dan implementasi yang belum memadai dari sarana dan prasarana Pemerintah desa. Berdasarkan deskripsi di atas dapat dirumuskan hipotesis:

H2: Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja kampung Akuntabilitas Keuangan kampung.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa yang akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban dari tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Akuntabilitas dana desa sebagai bentuk pertanggung jawaban ternyata dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan gender dari kepala desa sehingga berpengaruh juga kepada ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana desa (Karyanto, 2016).

Permasalahan terkait dana desa diungkapkan pada hasil penelitian dana desa dalam pengelolaannya tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa (ICW, 2018). Penelitian terkait akuntabilitas oleh ICW (2018) menemukan korupsi di desa, khususnya

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 86 – 101

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

terkait anggaran desa, di sebabkan pengelolaan anggaran yang besar tetapi implementasinya tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa.

Penelitian pengelolaan dana desa oleh Kurnia, Rahi (2019) dilakukan di Luhak nan Duo, menemukan dana desa belum dipertanggungjawabkan secara optimal dalam hal akuntabilitas dan transparansi karena kurang pemahaman mengenai laporan pertanggung jawaban, sering terjadi perubahan peraturan yang membingungkan pihak pengelola dan keterlambatan pencairan dana desa. Hasil penelitian Arfiansyah (2020) diketahui penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan deskripsi di atas dapat dirumuskan hipotesis:

H3: Akuntabilitas Keuangan kampung Berpengaruh Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung.

IV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kampung Bukit Makmur adalah sebuah kampung yang berada di wilayah Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena merupakan satu di antara Kampung di Kabupaten Berau yang memiliki partisipasi tinggi terkait APDBKamp. Objek dari

penelitian ini adalah warga kampung tersebut yang terlibat dan menghadiri pertemuan yang membahas pengelolaan APDBKamp. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang dikumpulkan dengan menyebar kuisisioner dan disertai dengan hasil wawancara dengan responden. Sedangkan data sekunder penelitian ini adalah berasal dari data laporan kampung terkait.

Teknik pengambilan sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara *Stratified Random Sampling*. Jumlah sampel yang diperoleh yaitu dari warga mengumpulkan kuisisioner adalah sebanyak 50 orang. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan kuisisioner.

Responden diminta untuk mengisi kuisisioner dengan memilih jawaban dalam skala Likert antara 1 (menunjukkan pernyataan sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (menunjukkan pernyataan sangat setuju). Variabel partisipasi diukur dengan 8 pernyataan menggunakan instrumen yang mencakup peran responden yang mengikuti penyusunan rencana anggaran, menyampaikan pendapat, terlibat dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Variabel akuntabilitas diukur dengan 6 pernyataan menggunakan instrumen yang mencakup penyusunan dan pertanggungjawaban telah melibatkan seluruh warga kampung

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 86 – 101

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

keterbukaan informasi, keterkaitan program/kegiatan dengan kebutuhan, kejelasan sumber anggaran, adanya bukti pengeluaran yang sah. Variabel persepsi diukur dengan 6 pernyataan menggunakan instrumen yang mencakup anggaran desa telah disusun sesuai kesepakatan, pelaksanaan sesuai perencanaan, penggunaan sesuai bukti pembayaran, hasil yang dicapai berupa manfaat, kemajuan desa dan memenuhi harapan warga desa.

Teknik penelitian ini menggunakan analisis data regresi linear berganda. Untuk mengetahui pengaruh antar variabel, hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan uji simultan (F-test) dan uji parsial (t-test). Sedangkan uji asumsi dalam penelitian ini menggunakan adalah uji normalitas, uji validitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas.

Kampung Bukit Makmur adalah sebuah kampung yang berada di wilayah Kecamatan Segah. Kampung ini terbagi menjadi lima RT (Rukun Tetangga) serta jumlah penduduk Kampung Bukit Makmur hingga akhir Mei 2021 tercatat sebanyak 1.104 jiwa yang terdiri dari 606 jiwa laki-laki dan 498 jiwa perempuan. Terbagi dalam 358 rumah tangga (Kepala Keluarga) yang tersebar dalam sebagian besar mata pencaharian masyarakat Kampung Bukit Makmur adalah petani kelapa sawit dan pertanian pangan. Hal itu sesuai dengan komoditas utama yang dikembangkan oleh masyarakat yaitu kelapa sawit dan pertanian pangan.

APBKamp yang digunakan dalam pembangunan kampung antara lain bersumber dari Dana Kampung. Dana Kampung yang diperoleh Kampung Bukit Makmur pada tahun 2019 sebesar Rp1.048.000,00, selanjutnya naik menjadi Rp1.224.804.000,00 pada tahun 2020 dan sebesar Rp1.320.070.000,00 pada tahun 2021. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Kampung sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden ini dikelompokkan berdasarkan atas umur, jenis kelamin dan pendidikan. Berdasarkan kelompok umur, karakteristik responden penelitian ini didominasi oleh responden yang berusia antara umur 20 tahun sampai dengan umur 30 tahun.

Berdasarkan jenjang pendidikan, responden didominasi oleh lulusan SMA atau sederajat.

2. Hasil Analisis Regresi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya Partisipasi Perencanaan APBKamp (X1) dan Akuntabilitas APBKamp (X2) terhadap Persepsi APBKamp di Kampung Bukit Makmur, kecamatan segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Uji regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS for Windows diperoleh hasil sebagai berikut:

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 86 – 101

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Tabel 4. Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	12,579	4,347	2,893	0,006
PARTISIPASI	0,150	0,092	1,625	0,111
AKUNTABILITAS	0,34	0,147	2,314	0,025

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS, 2021

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 12,579 + 0,150X_1 + 0,340X_2$$

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X1 dan X2) secara simultan terhadap variabel dependen (Y) digunakan analisis F test, dengan nilai signifikansi pada tingkat 5%. Jika nilai signifikansi > 5%, maka gagal tolak Ho and H1 ditolak. Jika nilai signifikansi <0.05, maka tolak Ho and H1 diterima.

Tabel 5. Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	56,066	2	28,033	4,855	,012b
Residual	265,607	46	5,774		
Total	321,673	48			

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS, 2021

Karena nilai signifikansi kurang dari 5% menunjukkan bahwa partisipasi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi. Jadi Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Kampung Berpengaruh Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung dapat diterima.

Untuk mengetahui variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen, dilakukan uji t-test. Hipotesis penelitian ini menggunakan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi > 5%, maka gagal tolak Ho and H1 ditolak.

Jika nilai signifikansi <0.05, maka tolak Ho and H1 diterima. Berdasarkan hasil regresi diatas, nilai signifikansi t pada partisipasi sebesar 0,111. Nilai koefisien lebih dari 5% menunjukkan: gagal Tolak H0, tolak H1, artinya tidak ada hubungan secara parsial antara partisipasi dengan persepsi.

Jadi Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tidak diterima.

Sedangkan nilai signifikansi t pada akuntabilitas adalah 0,025. Nilai koefisien kurang dari 5% menunjukkan tolak H0, terima H1, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial akuntabilitas terhadap persepsi. Jadi Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan Akuntabilitas Keuangan Kampung Berpengaruh Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung diterima.

Penilaian *Goodness of Fit* dan Interpretasi atas persamaan regresi diperoleh nilai adjusted R Square sebesar 0,138 sebagaimana tabel berikut ini.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 86 – 101

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Tabel 6. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,417a	0,174	0,138	2,4029	2,216

a) Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Partisipasi

b) Dependent Variable: Persepsi

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS, 2021

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 13,8% variasi dari variabel dependen. Sedangkan sisanya dijelaskan dalam variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian

3. Pengujian Asumsi

Hasil uji normalitas yang dilakukan dengan tes Kolmogorov-Smirnov pada program SPSS memperoleh hasil bahwa variabel – variabel penelitian adalah valid dan telah memenuhi syarat normalitas

Tabel 7. Tes Kolmogorov-Smirnov

	Unstandardized Residual
N	50
Normal Mean	0
Parameters a, b Std. Deviation	2,35233567
Most Extreme Absolute	0,109
Differences Positive	0,087
Negative	-0,109
Test Statistic	0,109
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200c,d

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS, 2021

Hasil uji data sebanyak 50 dengan nilai sig 0,200 (lebih besar dari 5%), artinya data terdistribusi normal, dengan rata-rata (mean) mendekati 0.

Sedangkan hasil uji reliabilitas ditunjukkan oleh nilai Alpha Cronbach sebagaimana pada tabel berikut.

Variabel	Jumlah Item	Nilai Hitung Alpha Cronbach	Keterangan
Partisipasi Perencanaan APBDes (X1)	8	0,725	Reliabilitas Tinggi
Akuntabilitas Keuangan (X2)	6	0,531	Reliabilitas Moderat
Persepsi Atas APBDes (Y)	6	0,661	Reliabilitas Moderat

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS, 2021

Untuk mengetahui adanya autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai 2,216. Dalam tabel Durbin-Watson dengan jumlah data $n = 50$ dan jumlah variabel $k = 3$, maka diperoleh nilai d berada diantara 1,6723 dan 2,3277. Karena hasil uji berada diantara kedua nilai tersebut, maka kesimpulannya Persamaan analisa regresi gagal tolak H_0 , artinya tidak terdapat autokorelasi.

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Nilai dari tolerance dan VIF masing-masing menunjukkan nilai tolerance yang dimiliki seluruh variabel bebas sebesar 0,966 (lebih besar dari 0,10) dan nilai VIF sebesar 1,035 (kurang dari 10).

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas model regresi dalam penelitian ini karena seluruh nilai signifikansi yang diperoleh dari

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 86 – 101

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

pengujian dengan metode Glejser diperoleh nilai sig 0,222. Nilai α lebih dari 0,05 terhadap absolute residual (Abs_Res) sehingga dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

VI. PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

1. Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Kampung Berpengaruh Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung

Berdasarkan hasil uji F, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan desa berpengaruh terhadap persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja kampung. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Tiwinarni dan Taman (2018) yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik secara simultan terhadap Persepsi Masyarakat tentang Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali.

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan yang semakin meningkat secara simultan dapat mendorong persepsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) semakin baik.

Persepsi masyarakat tersebut tumbuh berdasarkan perhatian, penafsiran dan ingatan atas informasi yang diperoleh sebagaimana pendapat Kotler (2001). Informasi tersebut dapat

diperoleh saat warga desa berpartisipasi dan terlibat langsung dalam seluruh proses pengelolaan APBKamp yang diyakini akuntabilitasnya.

Dengan perhatian dan penafsiran bahwa pengelolaan anggaran Kampung telah dilakukan secara terbuka, memenuhi ekspektasi dan memberi manfaat bagi masyarakat serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab akan membentuk persepsi bahwa hasil yang dicapai akan membawa dampak kemajuan bagi masyarakat. Berdasarkan persepsi tersebut, menurut McShane dalam Mardiyanto (2015), akan mendorong kepedulian dan empati sehingga masyarakat semakin aktif dalam setiap usaha yang memajukan kesejahteraan di Kampung.

2. Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

Berdasarkan hasil uji parsial, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap persepsi APBKamp. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangemanan dkk (2018) dan Tiwinarni dan Taman (2018).

Partisipasi tidak berpengaruh terhadap Persepsi APBDes karena adanya beberapa hambatan. Hal ini diungkapkan dalam penelitian lain yang menyatakan hambatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa masih lemah baik dari segi pikiran, tenaga, keahlian dan waktu yang disebabkan dengan

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 86 – 101

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

keputusan yang tidak bijaksana, komunikasi yang tidak interaktif, kurangnya kesadaran masyarakat, pendidikan yang rendah tidak ada transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dana desa (Syamsi, 2014).

Hasil wawancara dalam penelitian ini menunjukkan bahwa warga kampung hadir dalam pertemuan penyusunan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran desa, namun tidak terdapat informasi yang jelas apakah mereka menghadiri seluruh pertemuan. Bisa saja hasil partisipasi masyarakat akan berpengaruh jika responden lebih banyak melibatkan para pengurus kampung yang biasanya terlibat aktif dalam pembuatan keputusan. Selain itu responden perempuan mengisi 53% kuesioner.

Hasil penelitian Nurhalimah (2018) menunjukkan bahwa partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa pada Desa Berakit terdapat pada tingkatan partisipasi di masyarakat di dengar dan di perkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh memiliki kemampuan untuk mendapat jaminan bahwa pandangan mereka itu di pertimbangkan oleh pemegang kekuasaan. Jika kuesioner ini lebih banyak diisi oleh laki-laki mungkin akan menunjukkan hasil yang berbeda.

3. Akuntabilitas Keuangan kampung Berpengaruh Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja

kampung

Hasil uji parsial lain terkait akuntabilitas berpengaruh terhadap persepsi APBKamp. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ultrafiah (2017) dan Tiwinarni dan Taman (2018). Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil kuesioner, maka diperoleh hasil bahwa persepsi atas APBKamp yang baik tersebut dipengaruhi oleh keterbukaan informasi, program yang jelas dan sesuai kebutuhan, serta adanya bukti-bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

VII. PENUTUP

1. Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dan akuntabilitas keuangan kampung berpengaruh secara simultan terhadap persepsi anggaran pendapatan dan belanja kampung. Partisipasi masyarakat ini terlihat dari kehadiran dalam proses pembuatan keputusan, memberi masukan dan menampung kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi anggaran pendapatan dan belanja kampung. Meskipun hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian lain, namun bisa dilakukan pengumpulan kuesioner yang lebih banyak dengan responden laki-laki yang biasanya terlibat langsung dengan kegiatan di kampung.

Akuntabilitas keuangan kampung

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 86 – 101

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

berpengaruh secara parsial terhadap persepsi anggaran pendapatan dan belanja kampung. Bukti-bukti pembayaran dan laporan penggunaan dana telah disampaikan secara informatif dan transparan.

2. Saran

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi APBKamp didukung oleh partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Jika masyarakat terlibat dalam penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara akuntabel akan membentuk persepsi APBKamp yang baik. Dana kampung sebagai salah satu sumber pendanaan anggaran kampung akan mampu dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang tidak berpengaruh secara parsial terhadap persepsi anggaran pendapatan dan belanja kampung bisa terjadi karena tidak setiap pertemuan pembahasan APBKam dihadiri oleh para warga. Adanya mispersepsi perlu dibangun dengan cara membuat saluran komunikasi, seperti membagikan notulensi hasil rapat ke warga atau memasang di papan pengumuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, A. K. (2019). Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa. *Jurist-Diction*, 2(3), 747-772.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 334.
- Escobar-Lemmon, M., & Ross, A. D. (2014). Does decentralization improve perceptions of accountability? Attitudinal evidence from Colombia. *American Journal of Political Science*, 58(1), 175-188.
- Hanafie, H., Nugraha, A., & Huda, M. (2019). Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 4(1), 39-46.
- Ibrahim, I., Rejeki, S., & Sawaludin, S. (2017). Persepsi masyarakat Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat terhadap Undang- Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.
- ICW, I. C. W. (2018). Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik.
- Indonesia, Pemerintah Republik (2014). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Keuangan Desa Berbasis Undang- Undang No 6 Tahun 2014. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 6(01), 1-14.
- Kharisma, F., Paranoan, D. B., & Nasir, B. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan di kelurahan Singa Geweh Kabupaten Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur.
- Komaling, A. A., Engka, D. S., & Sumual, J. I. (2020). Persepsi Masyarakat terhadap Pemanfaatan Dana Desa di Desa Kanonang 2

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.6, No.1, April 2022, pp. 86 – 101

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- Kecamatan Kawangkoan Barat. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 20 No. 01.
- Kotler, Philip. (2001). A Framework for Marketing Management, Prentice Hall.
- Laksana, N. S. (2013). Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam program desa siaga di Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal kebijakan dan manajemen publik, 1(1).
- Lusdani, W., & Ta'dung, Y. L. (2020). Dana Desa: Paradoks Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan. *Economix*, 8(1).
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing " Goodwill", 8(1).
- Nurhalimah, A. (2018). Partisipasi Kaum Perempuan Dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 6(2), 35-54.
- Saputra, H. J. (2019). Model Tata Kelola Dana Desa. Jurnal Ilmu Akuntansi UGM. No.2, Publis
- Solichin, S., & Akmal, S. (2018). Persepsi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(2), 20-26
- Syamsi, Syahrul. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Malang: Universitas Tribhuwana Tungadewi
- Tampubolon, J., Aluyah, C., & Heptiana, E. (2019). Persepsi masyarakat desa riding Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap upaya pencegahan kebakaran di lahan gambut. *Sylva*, 7(2), 49-57.
- Tandi, P. (2020). Analisis Akuntabilitas Dana Desa di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. *Ekomen*, 18(2), 41-50.
- Tiwinarni, T., & Taman, A. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(6)
- Ultafiah, W. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang).
- Umar, H., Usman, S., & Purba, R. B. R. (2018). The Influence Of Internal Control And Competence Of Human Resources On Village Fund Management And The Implications On The Quality Of Village Financial Reports. *International Journal Of Civil Engineering And Technology*, 9(7), 1526–1531.
- Wang, X., & Wan Wart, M. (2007). When public participation in administration leads to trust: An empirical assessment of managers' perceptions. *Public administration review*, 67(2), 265-278.